

## SDG'S DESA PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN



Judul Buku : SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan  
Penulis : A. Halim Iskandar  
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Cetakan : pertama, November 2020  
Tebal : xviii+179 hlm  
ISBN : 978-602-433-982-1  
Harga : Rp 70.000;

Buku “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” ini menyuguhkan gagasan baru dari A. Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengarusutamanya dalam konteks pembangunan desa untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia yang dinarasikan secara baik, jelas, dan sistematis. Buku ini menjadi sangat menarik untuk disimak lebih lanjut mengingat sejak awal diumumkan sebagai Menteri pada bulan Oktober 2019, penulis sudah memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat untuk mengambil peran strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis diawal buku bahwa akar permasalahan pembangunan desa di Indonesia ada di desa dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia serta mewujudkan Indonesia maju harus dimulai dari desa. Motivasi dan keyakinan kuat penulis itulah yang mendorong munculnya gagasan penulis untuk melokalkan konsep SDGs dalam pembangunan desa atau “SDGs Desa” sebagaimana dikenalkan pada buku yang diterbitkan setahun setelah penulis menjabat sebagai Menteri. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari seri buku Trilogi SDGs Desa yang membahas mulai dari konsep, metode pengukuran, dan hasil-hasil SDGs Desa sehingga untuk memperoleh pemahaman lebih utuh maka buku ini sangat layak disimak sejak awal (Seri 1).

Buku ini sangat menarik karena penulis berhasil menjelaskan gagasan SDGs Desa dalam uraian isi buku yang rinci, jelas, dan sistematis dengan didukung oleh basis data yang cukup kuat dan kekinian. Dari buku ini, pembaca bisa memahami secara utuh gagasan penulis tersebut mulai dari latar belakang munculnya konsep SDGs Desa di Indonesia; sejarah dan perkembangan paradigma pembangunan dari Millenium Development Goals (MDGs) ke SDGs sebagai sebuah paradigma pembangunan hingga integrasi dan pengarusutamaannya ke dalam agenda pembangunan nasional dan pembangunan desa; urgensi SDGs Desa dalam pembangunan desa; proses, metode, dan strategi melokalkan SDGs Desa; rumusan konsep, aksi, dimensi dan indikator SDGs Desa; hingga strategi implementasi SDGs dalam praktek pembangunan desa.

Pada bagian pertama “Agenda Pembangunan”, penulis menjelaskan mengenai konsep, strategi, dan perbedaan pendekatan pembangunan yang berkembang di level dunia mulai dari munculnya International Development Goals (IDGs) pada pertengahan dekade

1990-an, kemudian MDGS pada tahun 2000, hingga SDGs pada tahun 2015. SDGs adalah pendekatan pembangunan yang disepakati secara internasional sebagai sebuah agenda pembangunan global dengan 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yang saling terkait, saling mempengaruhi, inklusif, dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun terlewatkan (*no one left behind*) dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030. Secara keseluruhan, SDGs bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, SDGs memiliki tiga pilar utama yaitu pembangunan manusia, sosial ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai proses integrasi SDGs ke dalam agenda kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, namun belum sampai di level desa, sementara sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dratis dengan sumber daya dan potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs. Penulis berpendapat bahwa pengarusutamaan pembangunan desa dapat berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian TPB sehingga SDGs Desa menjadi sangat penting dan mendesak. Namun demikian, pada bagian ini penulis nampaknya masih perlu menjelaskan lagi secara lebih rinci indikator dan cara pengukuran dari capaian kontribusi tersebut, misalnya dengan menampilkan data perbandingan terhadap capaian TPB sehingga justifikasinya menjadi semakin kuat. Pada bagian kedua “SDGs dalam Pembangunan Desa”, penulis menjelaskan gambaran dinamika desa dan pembangunan desa di Indonesia dari perspektif sejarah dan kebijakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari zaman kolonial, awal kemerdekaan, era reformasi, hingga lahirnya UU Desa. Pada bagian ini penulis juga menjelaskan kondisi desa sebelum dan setelah UU Desa serta analisis data dan hasil kajian yang cukup komprehensif terkait capaian pembangunan desa selama implementasi UU Desa yang dinilai telah bermanfaat dan berhasil menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat desa mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Pada bagian ketiga “Urgensi SDGs Desa”, penulis menjelaskan mengenai abstraksi konsep pembangunan desa pada UU Desa serta kekurangan dari ukuran pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa/IPD dan Indeks Membangun Desa/IDM) sehingga posisi SDGs semakin penting karena selain sesuai dengan kebijakan pembangunan desa juga dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa sehingga peluang keberhasilan pencapaian SDGs pada satu desa menjadi maksimal. Pada tataran kebijakan, SDGs ini langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai acuan bagi desa untuk penyusunan kegiatan dan penganggaran tahunan masing-masing desa. Namun demikian, pada bagian ini penulis nampaknya masih perlu menjelaskan lagi secara lebih rinci mengenai proses perumusan kebijakan dan contoh implementasi peraturan tersebut sehingga lebih mudah dipahami secara teknis oleh desa. Penggunaan pilihan kata atau kalimat “tanpa banyak cincong, SDGs langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri...” mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut seolah dilakukan atau ditetapkan secara sepihak oleh penulis sebagai Menteri tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusannya, sekalipun pada bagian keenam penulis telah menegaskan kembali bahwa pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa tidak berlangsung dari atas kebawah tetapi menyesuaikan SDGs agar sesuai konteks desa yang selama ini memberikan kekhususan dalam pembangunan.

Pada bagian keempat “Melokalkan SDGs sebagai SDGs Desa”, penulis menjelaskan mengenai perkembangan paradigma modernisasi, ketergantungan dan

partisipasi dalam pembangunan; pentingnya melokalkan pembangunan melalui paradigma partisipasi; dan strategi melokalkan narasi akbar SDGs ke level desa mulai dari penyusunan ulang gambar ikon SDGs menjadi lebih jelas, tidak abstrak, dan lebih dekat kepada realitas di desa-desa Indonesia hingga pernyataan tujuan SDGs Desa yang terdiri dari 18 tujuan.

Pada bagian kelima “SDGs Desa”, penulis menjelaskan mengenai SDGs Desa sebagai sebuah aksi atau upaya terpadu untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan tipologi: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan; desa ekonomi tumbuh merata; desa peduli kesehatan; desa peduli lingkungan; desa peduli pendidikan; desa ramah perempuan; desa berjejaring; dan desa tanggap budaya. Selanjutnya apabila kedelapan tipologi desa tersebut dapat terwujud dalam waktu yang bersamaan, maka saat itulah desa tersebut disebut dengan Desa Pancasila yang oleh penulis dikatakan sebagai tujuan akhir dari pembangunan desa dan TPB sampai tahun 2030. Namun demikian, penulis nampaknya perlu menjelaskan lebih rinci mengenai alasan pemilihan istilah “Desa Pancasila” tersebut sebagai tujuan akhir dari SDGs Desa. Selanjutnya, pada bagian ini, penulis menjelaskan lebih lanjut secara rinci mengenai enam dimensi SDGs Desa dan 18 tujuan SDGs Desa. Setiap tujuan SDGs Desa tersebut, penulis menjelaskan latar belakang kondisi desa saat ini, upaya dan indikator pencapaian tujuan SDGs tersebut sekalipun masih perlu dioperasionalkan lebih lanjut.

Pada bagian keenam “SDGs Desa 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif”, penulis menjelaskan secara khusus satu tujuan SDGs Desa yang merupakan tambahan tujuan pembangunan yang sangat khas untuk konteks desa di Indonesia yaitu sebagai upaya untuk mengedepankan kearifan lokal desa yang mampu memadukan adat dan kebiasaan setempat dengan proses-proses pembangunan, hasil, manfaat dan dampaknya sehingga menjaga perubahan desa. Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa ke-18 ini menjadi kunci penting implementasi SDGs Desa.

Pada bagian akhir “Epilog: Harapan”, penulis menegaskan kembali argumentasi-argumentasi terkait urgensi pengarusutamaan SDGs Desa dalam pembangunan sehingga dapat memperkuat posisi desa sebagai poros utama dalam mewujudkan SDGs. Selain itu, penulis juga menegaskan kembali semangat optimisme dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara sadar, aktif, dan kolaboratif dalam mewujudkan SDGs Desa 2030.

Secara keseluruhan, kehadiran buku “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” sangat tepat dan patut disambut baik karena buku ini dapat menjadi landasan akademis yang cukup kuat dari kebijakan SDGs Desa yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai upaya mendorong percepatan capaian tujuan pembangunan desa dan TPB ditengah minimnya kebijakan berbasis bukti penelitian. Oleh karena itu, buku ini layak menjadi referensi utama bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan terutama praktisi desa agar ruh pengarusutamaan SDGs Desa dapat diimplementasikan secara nyata pada praktek pembangunan desa saat ini sehingga mampu mendorong kemajuan desa di Indonesia dan memajukan Indonesia. (Rosita Novi Andari)